

STATUS DAN DETERMINAN PENDAPATAN PETANI AGROFORESTRI DI LINGKUNGAN TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI

The State and Determinants of Agroforestry Farmers' Income in the Surrounding Areas of the Gunung Ciremai National Park

Suyadi^{1*}, Sumardjo², Zaim Uchrowi², Prabowo Tjitropranoto², Dewa Ketut Sadra Swastika³

¹Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar
Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 17,5, Makassar 90241, Sulawesi Selatan, Indonesia

²Departemen Sains KPM, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
Gedung FEMA Wing 1 Lantai 5, Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat, Indonesia

³Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia

* Korespondensi penulis. E-mail: suyadi.wsd@gmail.com

Diterima: 12 Maret 2018

Direvisi: 2 April 2018

Disetujui terbit: 7 Agustus 2018

ABSTRACT

Rural communities in Gunung Ciremai National Park (GCNP) are generally low income farmers. Farms that have long been adopted agroforestry farming systems through inter generation legacy. The existing agroforestry technology applied by the farmers remains the simple traditional technology, so that the crops yields and income are low. Understanding the determinants of farmers' income is useful in formulating the appropriate policy for increasing farmers' income. This study was aimed to analyze the level and determinants of the agroforestry farmers income in GCNP. This research was conducted in Kuningan and Majalengka Regency, West Java Province, in July to October 2017. The data was collected by interviewing 310 agroforestry farmers which were selected using the cluster random sampling technique with clusters consisted of the locations of farmer groups from agroforestry in the GCNP buffer zone. The data was analyzed using descriptive statistics and regression inferential statistics. The results show that the income of agroforestry farmers was low because of low agroforestry farmers' capacity, weak extension support and weak leadership role of informal leaders. Supports of the forestry extension service and informal leaders' leadership roles are needed for enhancing the agroforestry farmers' capacity in increasing their income.

Keywords: *agroforestry, farmers, income, national park*

ABSTRAK

Masyarakat perdesaan di lingkungan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) umumnya adalah petani kurang sejahtera yang telah lama menekuni agroforestri turun-temurun. Penerapan teknologi pada sistem usaha tani agroforestri masih sederhana sehingga produktivitas tanaman masih rendah yang berdampak pada rendahnya pendapatan. Berbagai faktor dapat memengaruhi tingkat pendapatan petani agroforestri, sehingga perlu diungkap faktor-faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran dan determinan pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat pada bulan Juli sampai Oktober 2017. Data diperoleh dari 310 orang petani yang dipilih berdasarkan *cluster random sampling* dengan klaster lokasi kelompok tani agroforestri di desa penyangga kawasan TNGC. Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan statistik inferensial regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC rendah karena rendahnya kapasitas petani agroforestri, lemahnya dukungan penyuluhan kehutanan, dan lemahnya peran kepemimpinan tokoh informal. Dukungan penyuluhan kehutanan dan peran kepemimpinan tokoh informal perlu ditingkatkan agar petani agroforestri memiliki kapasitas yang memadai dalam meningkatkan pendapatan mereka.

Kata kunci: *agroforestri, pendapatan, petani, taman nasional*

PENDAHULUAN

Masyarakat perdesaan yang tinggal di lingkungan TNGC sebagian besar sebagai petani dengan usaha tani agroforestri. Usaha tani

agroforestri telah lama ditekuni bahkan sudah turun-temurun. Namun, kondisi mereka kurang berdaya dan tergolong belum sejahtera karena penghasilan mereka umumnya rendah. Hal ini dikuatkan oleh data BPS (2017) yang menunjukkan sebanyak 17,28 juta jiwa atau 62,25% dari

27,76 juta penduduk miskin tinggal dan hidup di perdesaan di dalam dan sekitar kawasan hutan. Desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan pada umumnya merupakan kantong-kantong kemiskinan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena masyarakat belum cukup mendapat akses ke sumber daya hutan untuk menopang kesejahteraannya. Dukungan sumber daya hutan kurang dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan hutan, termasuk lingkungan TNGC. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Puspitojati et al. (2012) dan Langat et al. (2016) yang menjelaskan bahwa masyarakat perdesaan sangat bergantung pada sumber daya hutan. Mereka tinggal dekat hutan, memungut hasil hutan untuk dikonsumsi sendiri, atau bekerja di dalam kawasan hutan. Dalam kaitan ini, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan merupakan jawaban kunci untuk mengoptimalkan akses pengelolaan sumber daya hutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Handoko (2014) menjelaskan bahwa pembangunan hutan yang berkelanjutan di Indonesia masih dihadapkan pada masalah-masalah berupa ketidakpastiaan pengelolaan, rendahnya kapasitas pengelolaan, dan rendahnya penegakan hukum.

Menurut sejarahnya, kawasan TNGC seluas kurang lebih 15.500 hektare telah beberapa kali mengalami perubahan status kawasan berdasarkan fungsinya. Pada zaman kolonial Belanda sampai dengan tahun 1978, kawasan TNGC merupakan kawasan hutan tutupan atau hutan lindung, kemudian berubah menjadi hutan produksi pada tahun 1978–2003. Kawasan TNGC kembali menjadi hutan lindung pada tahun 2003–2004, dan sejak 2004 ditetapkan oleh Menteri Kehutanan menjadi TNGC (hutan konservasi). Perubahan status kawasan tersebut tentunya sangat berdampak pada masyarakat di lingkungan Gunung Ciremai baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial. Pada kawasan hutan fungsi produksi, masyarakat petani mendapatkan akses langsung untuk terlibat dalam pengelolaan lahan kawasan dengan sistem tumpang sari. Hal ini tentunya secara ekonomi sangat menguntungkan petani, namun secara ekologi telah menyebabkan kerusakan vegetasi hutan alam dan berkurangnya peran pengaturan tata air. Selama kurun waktu kurang lebih 25 tahun masyarakat di lingkungan hutan Gunung Ciremai lebih merasakan manfaat ekonomi secara nyata. Berbeda halnya dengan pasca ditetapkannya menjadi kawasan taman nasional. Masyarakat tidak boleh lagi melakukan pengelolaan hutan pola tumpang sari sehingga mereka kehilangan hak pengolahan lahan hutan. Untuk dapat menopang kebutuhan hidup keluarga, petani

hanya bergantung pada lahan milik pribadi dengan luas yang kurang memadai.

Secara umum, hutan sangat penting bagi kehidupan manusia, baik untuk kehidupan generasi sekarang maupun generasi mendatang (Hidayat 2015). Kelestarian sumber daya hutan adalah tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat petani di sekitar hutan. Untuk mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya hutan dan motivasi petani dalam berusaha tani diperlukan penggerak atau seseorang yang mampu memengaruhi. Salah satu penggerak bagi petani di sekitar hutan tersebut adalah tokoh informal. Tokoh informal mempunyai pengaruh sebagai seorang pemimpin. Keterlibatan tokoh informal menjadi sangat penting dalam meningkatkan kemandirian masyarakat sekitar hutan dan secara spesifik adalah petani sekitar hutan dalam berusaha tani agroforestri. Hal ini selaras dengan Mutmainah dan Sumardjo (2014) yang menyatakan bahwa peran pemimpin kelompok meliputi kemampuan pemimpin dalam memberikan arahan dan tuntunan bagi anggota kelompoknya, mampu memfasilitasi agar tercapai tujuan, mampu mendinamiskan para anggota untuk aktif, dan mampu dalam menampung aspirasi anggota kelompoknya. Kemandirian petani dalam berusaha tani agroforestri dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Terwujudnya kesejahteraan petani dan keluarganya tersebut, tentunya akan berdampak pula pada kelestarian sumber daya hutan karena terbebas dari ancaman kerusakan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk peran dari tokoh informal dalam mendukung suksesnya pembangunan sektor kehutanan.

Tokoh informal merupakan sosok atau figur individu dalam masyarakat yang karena kelebihan yang dimiliki baik ilmu pengetahuan, kekayaan, keturunan, atau kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, diakui dan diterima oleh warga masyarakat sebagai tokoh yang dihormati dan dipatuhi. Tokoh informal tersebut menjadi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Petani agroforestri yang tinggal di lingkungan taman nasional pada umumnya masih patuh kepada pemimpin mereka, patuh terhadap orang-orang yang ditokohkan baik secara formal maupun informal. Hal ini dapat dilihat dari sikap hormat yang tinggi terhadap tokoh-tokoh dalam berbagai aspek kegiatan. Apa yang diperintahkan, disarankan, atau diharapkan oleh tokoh-tokoh mereka, umumnya dipatuhi dan dilaksanakan. Pada kondisi masyarakat seperti ini, tokoh informal mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan sumber daya manusia kehutanan

yang mandiri. Tokoh informal mampu berperan dalam memfasilitasi antara keinginan masyarakat setempat dengan pihak pemerintah atau swasta. Tokoh informal dituntut mampu menjadi pendorong bagi masyarakatnya dalam mengelola hutan agar tidak merusak dan mendorong pemerintah agar memperhatikan kemauan dan kepentingan rakyat. Tokoh informal juga mampu berperan menjadi juru bicara atau wakil masyarakat dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah, demikian juga sebaliknya. Hal ini selaras dengan penelitian Suprayitno et al. (2011) yang menemukan bahwa tokoh masyarakat sekitar hutan kemiri memainkan peranan cukup penting dalam memotivasi masyarakat atau petani sekitar hutan untuk melestarikan hutan.

Petani agroforestri perlu juga memiliki kapasitas yang memadai. Kapasitas tersebut meliputi kompetensi agribisnis (budi daya, pengolahan hasil, pemasaran) dan kemandirian petani. Jika petani memiliki kemampuan dalam hal agribisnis dan juga mandiri, maka pengelolaan usaha taninya akan lebih baik dan hasilnya juga meningkat. Berkaitan dengan kemandirian petani, Sumardjo (1999) menjelaskan bahwa individu yang mandiri sejati adalah maju (modern) dalam perilaku (kognitif, afektif, dan psikomotorik), efisien, dan berdaya saing tinggi (*competitiveness*) sehingga mampu berpikir atau bertindak (mengambil keputusan) secara cepat dan tepat, serta mampu bermitra dan membangun jejaring yang saling menguatkan dan menguntungkan.

Sampai saat ini berbagai penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pendapatan petani agroforestri telah dilakukan. Salah satu di antaranya adalah penelitian Diniyati et al. (2013) yang mengungkapkan bahwa usaha hutan rakyat pola agroforestri didukung oleh kondisi topografi wilayah dan ketersediaan lahan yang lebih luas dibandingkan untuk usaha lainnya.

Demikian juga Kusumedi dan Jariyah (2010) melaporkan bahwa agroforestri merupakan pilihan tepat dalam pemanfaatan lahan milik masyarakat/petani karena mampu memberikan pendapatan dalam jangka pendek untuk biaya hidup harian dan pendapatan jangka panjang sebagai tabungan. Hasil penelitian lainnya oleh Ruhimat (2015a) yang menyatakan bahwa faktor-faktor kunci yang harus diperhatikan dalam keberlanjutan usaha tani agroforestri terdiri dari faktor peranan penyuluh, ketersediaan paket teknologi agroforestri, peranan pemerintah, dan eksistensi kelompok tani.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan metode

kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis (1) pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga yang membidangi penyuluhan kehutanan, yaitu memberi masukan-masukan untuk bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang melibatkan peran tokoh informal, khususnya dalam upaya peningkatan kapasitas petani agroforestri yang selanjutnya berdampak pada peningkatan pendapatan.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

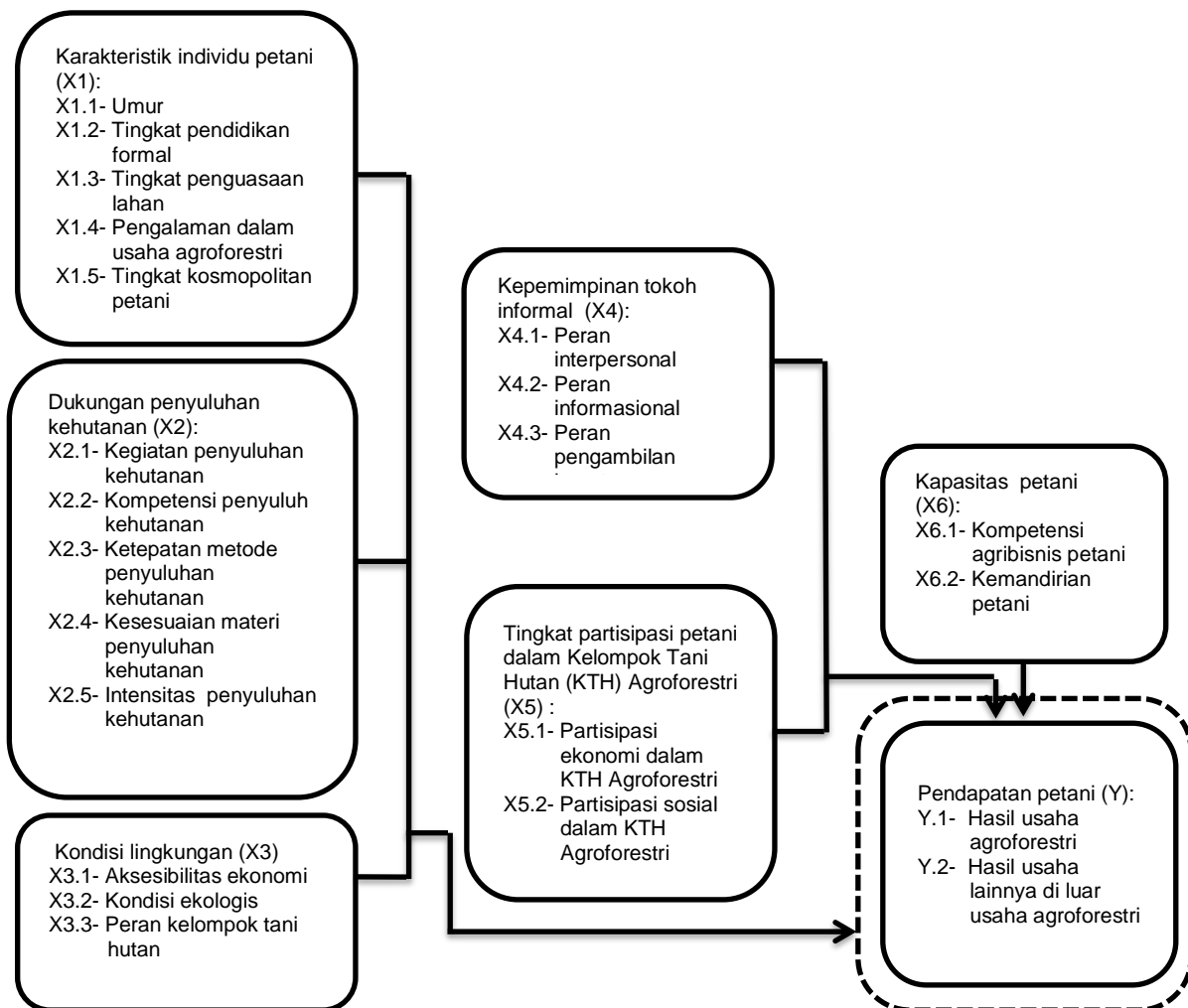
Petani agroforestri saat ini dalam kondisi kurang berdaya, kapasitas rendah, dan tergolong miskin. Menghadapi kondisi seperti ini, perlu dicari solusinya agar bisa berubah. Perubahan yang diharapkan adalah petani agroforestri lebih berdaya, memiliki kapasitas yang tinggi, lebih mandiri dan sejahtera. Perubahan kondisi petani tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas diri petani. Kapasitas tersebut meliputi kompetensi dan kemandirian petani. Kompetensi petani dalam kaitannya dengan usaha agroforestri antara lain meliputi kompetensi teknik budi daya, pengolahan hasil, dan pemasaran. Kemandirian petani dalam kaitannya dengan usaha agroforestri meliputi aspek daya saing, daya saing, dan daya sanding. Hal ini merujuk pada konsep kemandirian yang dikemukakan oleh Sumardjo (1999), Sumardjo et al. (2014), dan Sumardjo (2016), bahwa kemandirian petani dapat dilihat dari tiga indikator yaitu daya saing, daya saing, dan daya sanding. Daya saing yaitu petani percaya diri dan mampu mengambil keputusan atau mengambil tindakan yang dinilai paling menguntungkan. Daya saing yaitu petani mempunyai kemampuan untuk bisa lebih unggul dari pihak lain, dan daya sanding adalah petani mampu bekerja sama dalam kedudukan yang setara sehingga terjadi saling ketergantungan yang saling menguntungkan.

Langkah yang dipandang sangat relevan dan efektif sebagai upaya peningkatan kapasitas diri petani agroforestri adalah melalui peningkatan partisipasi. Tingkat partisipasi petani agroforestri dapat dilihat pada kegiatan agroforestri, baik yang berhubungan dengan aspek ekonomi maupun sosial. Upaya percepatan peningkatan partisipasi petani agroforestri memerlukan faktor penggerak yang mampu memotivasi petani. Salah satu faktor penggerak yang dinilai sangat

penting perannya adalah tokoh informal. Pengaruh kuat yang dimiliki oleh tokoh informal terbentuk secara alami karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang tokoh dan secara langsung diakui dan diterima dengan kesadaran sendiri oleh anggota masyarakat. Derajat pengaruh seorang tokoh informal tersebut merupakan cerminan dari kepemimpinan tokoh informal yang terdiri dari tiga peran, yaitu interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan. Ketiga peran ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mintzberg (1973), bahwa peran kepemimpinan dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Teori pemberdayaan dalam penelitian ini mengacu pada Sumodiningrat (1999) yang menjelaskan bahwa proses menuju keberdayaan petani dilihat dari beberapa sudut pandang, di antaranya (a) menciptakan suasana yang memungkinkan petani berkembang; (b) peningkatan kemampuan petani dalam membangun

melalui bantuan dana, pelatihan, pembangunan sarana, prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan daerah; (c) perlindungan pada petani yang lemah; dan (d) menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Model kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.

Secara operasional penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC meliputi variabel bebas (X) dan variabel tidak bebas (Y). Berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 1, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC (Y) dipengaruhi oleh faktor karakteristik individu petani (X1), dukungan penyuluhan kehutanan (X2), kondisi lingkungan (X3), kepemimpinan tokoh informal (X4), tingkat partisipasi petani dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Agroforestri (X5), dan kapasitas petani (X6).



Gambar 1. Kerangka pemikiran operasional tentang faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC

Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan rancangan survei. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan sejak bulan Juli sampai Oktober 2017. Lokasi penelitian di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat dipilih atas pertimbangan keberadaannya di lingkungan TNGC.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani agroforestri. Populasi merupakan anggota KTH Agroforestri yang tinggal di desa-desa penyangga kawasan TNGC dengan jumlah 1.043 orang. Teknik sampling yang digunakan ialah cluster random sampling, yaitu berdasarkan desa lokasi KTH Agroforestri. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 310 orang responden, terdiri dari 191 orang responden di Kabupaten Kuningan dan 119 orang responden di Kabupaten Majalengka.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, yakni variabel bebas (karakteristik individu petani, dukungan penyuluhan kehutanan, dan dukungan lingkungan, kepemimpinan tokoh informal, tingkat partisipasi petani dalam KTH Agroforestri, kapasitas petani), dan variabel tidak bebas (pendapatan petani). Data komponen pendapatan usaha tani yang dikumpulkan antara lain volume penggunaan input produksi (bahan dan tenaga kerja), volume produksi dari komoditas yang diusahakan, harga satuan masing-masing input dan masing-masing produk komoditas yang diusahakan. Selain itu, juga dikumpulkan pendapatan dari kegiatan *off-farm* dan kegiatan *non-farm*.

Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah dengan membuat kuesioner (daftar pertanyaan), melakukan pengamatan (observasi) langsung di lapangan dan wawancara mendalam baik dengan petani ataupun dengan informan lainnya. Untuk data kualitatif, skala data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala ordinal 4 (selalu), 3 (sering), 2 (kadang), 1 (tidak pernah). Data yang diperoleh diolah dan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis secara kuantitatif dicirikan dengan pengujian hipotesis. Untuk memberikan penjelasan atau makna dari hasil pengujian hipotesis tersebut, diberikan penjelasan secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan teori-teori serta hasil penelitian-penelitian lain yang mendukung.

Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur pustaka dari berbagai sumber yang berhubungan dengan tujuan penelitian, di antaranya dari

instansi Balai TNGC, Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan Badan Pusat Statistik. Jenis data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari luas kawasan TNGC, desa penyangga kawasan TNGC, penyuluh kehutanan, jumlah penduduk, dan pemberdayaan masyarakat.

Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial (analisis regresi). Statistik deskriptif digunakan dalam rangka memberikan gambaran mengenai sebaran responden pada setiap peubah, dengan memakai tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, digunakan statistik inferensial, yaitu menggunakan regresi, untuk melakukan estimasi atau pendugaan terhadap populasi (generalisasi) dalam rangka melihat sejauh mana variabel bebas memengaruhi variabel terikat.

Secara matematis, model pendugaan faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n$$

di mana:

Y = pendapatan petani

α = konstanta

β_1 β_n = parameter estimasi

X_1 X_n = variabel bebas

Adapun masing-masing variabel bebas dalam penelitian ini adalah

X_1 = karakteristik individu petani (umur, tingkat pendidikan formal, tingkat penguasaan lahan, pengalaman dalam usaha tani agroforestri, tingkat kosmopolitan petani)

X_2 = dukungan penyuluhan kehutanan (kegiatan penyuluhan kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan, ketepatan metode penyuluhan kehutanan, kesesuaian materi penyuluhan kehutanan, dan intensitas penyuluhan kehutanan)

X_3 = kondisi lingkungan (aksesibilitas ekonomi, kondisi ekologis, dan peran KTH)

X_4 = kepemimpinan tokoh informal (peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan)

X_5 = tingkat partisipasi petani dalam KTH Agroforestri (partisipasi ekonomi dalam KTH Agroforestri, dan partisipasi sosial dalam KTH Agroforestri)

X_6 = kapasitas petani (kompetensi agribisnis petani, dan kemandirian petani)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Peubah Penelitian Karakteristik Individu Petani Agroforestri

Karakteristik individu petani agroforestri di lingkungan Taman Nasional dalam penelitian ini diindikasikan dengan umur, pendidikan formal, penguasaan lahan, pengalaman usaha tani, dan tingkat kosmopolitan (Tabel 1). Petani agro-

forestri di lingkungan TNGC tergolong dalam umur produktif, berpendidikan rendah, memiliki lahan sempit, pengalaman usaha tani rendah, dan tingkat kosmopolitan juga rendah.

Kemampuan bekerja dalam mengelola lahan dengan sistem agroforestri dipengaruhi oleh umur. Pengelolaan lahan dengan sistem agroforestri membutuhkan umur dalam taraf produktif karena beban pekerjaan masih bersifat intensif. Secara fisik usaha agroforestri

Tabel 1. Deskripsi peubah penelitian berdasarkan rata-rata di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, 2017

Peubah penelitian	Rataan*		
	Kuningan	Majalengka	Gabungan
Karakteristik individu petani:			
Umur (tahun)	49,0	51,0	50,0
Pendidikan formal (tahun)	8,0	7,0	8,0
Penguasaan lahan (ha)	0,5	0,4	0,5
Pengalaman usaha tani agroforestri (tahun)	20,0	23,0	21,0
Tingkat kosmopolitan petani (skor)	38,6	37,0	38,6
Dukungan penyuluhan kehutanan:			
Kegiatan penyuluhan kehutanan (skor)	37,6	40,9	36,8
Kompetensi penyuluh kehutanan (skor)	45,1	45,9	44,8
Ketepatan metode penyuluhan kehutanan (skor)	34,0	34,9	34,3
Kesesuaian materi penyuluhan kehutanan (skor)	49,2	56,4	53,9
Intensitas penyuluhan kehutanan (skor)	32,5	24,4	29,4
Dukungan lingkungan:			
Aksesibilitas ekonomi (skor)	33,3	40,3	32,1
Kondisi ekologis (skor)	73,8	69,8	72,2
Peran KTH (skor)	40,8	41,4	41,1
Kepemimpinan tokoh informal:			
Peran interpersonal (skor)	48,1	37,8	47,2
Peran informasional (skor)	49,6	37,9	45,1
Peran pengambilan keputusan (skor)	47,7	47,2	43,7
Tingkat partisipasi petani dalam KTH Agroforestri:			
Partisipasi ekonomi (skor)	26,4	24,3	24,3
Partisipasi sosial (skor)	55,4	46,2	53,8
Kapasitas petani:			
Kompetensi agribisnis (skor)	50,8	55,7	49,7
Kemandirian (skor)	47,3	59,5	47,7
Pendapatan petani:			
Hasil usaha agroforestri (skor)	37,4	40,9	37,0
Hasil usaha di luar usaha agroforestri (skor)	30,2	39,3	38,5

* Keterangan:

Umur: 18–35 tahun (dewasa awal), 36–50 tahun (dewasa pertengahan), >50 tahun (dewasa akhir)

Pendidikan formal: ≤6 tahun (SD), 7–9 tahun (SMP), 10–12 tahun (SMA), >12 tahun (Sarjana)

Penguasaan lahan: ≤0,5 ha (sangat sempit), 0,6–1 ha (sempit), 1–5 ha (luas), >5 ha (sangat luas)

Pengalaman usaha tani agroforestri: 1–15 tahun (sangat rendah), 16–30 tahun (rendah), 31–45 tahun (tinggi), >45 tahun (sangat tinggi)

Selang skor: kategori 0–25 (sangat rendah), 26–50 (rendah), 51–75 (tinggi), 76–100 (sangat tinggi)

Sumber: Data primer (2017), diolah

memerlukan petani yang masih dalam umur produktif, yaitu berkisar antara 18–50 tahun (Hudiyani 2013; Premono dan Lestari 2013; Suherdi et al. 2014). Lebih lanjut Suherdi et al. (2014) menegaskan bahwa pada usia produktif petani memiliki fisik yang kuat, pengetahuan dan kemampuan yang memadai, dan intensitas hubungan sosial yang baik, sehingga mampu melakukan usaha tani dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan umur produktif petani agroforestri di lingkungan TNGC Kabupaten Kuningan dan Majalengka dalam kategori dewasa awal dan pertengahan, yaitu kisaran 18–50 tahun (55,16%). Sebanyak 44,84% responden cenderung ke arah tidak produktif karena sudah tua atau tergolong dewasa akhir, yaitu berumur lebih dari 50 tahun.

Pendidikan formal petani agroforestri di lingkungan TNGC Kabupaten Kuningan dan Majalengka didominasi oleh pendidikan SD dan SMP (78,71%). Hal ini akan berdampak pada upaya peningkatan kapasitas petani. Kondisi ini selaras dengan Kusumedi dan Jariyah (2010), Premono dan Lestari (2013), dan Suherdi et al. (2014) yang menyatakan bahwa petani hutan pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan SD dan SMP yang pekerjaan pokoknya adalah sebagai petani. Hal ini juga sejalan dengan Winata dan Yuliana (2012) yang menyatakan bahwa dalam berusaha tani, petani hutan tidak berbekal pendidikan formal, tetapi mereka hanya berbekal pengalaman bertani yang sudah ditekuni sejak usia muda. Akan tetapi, tingkat pendidikan formal yang rendah tidak menghalangi petani hutan untuk menimba ilmu guna kemajuan mereka terutama dalam menggarap lahan pertanian. Tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada tingkat pengetahuan petani hutan. Tingkat pengetahuan masyarakat petani berhubungan dengan perannya dalam suatu program kegiatan.

Semua lahan petani yang digunakan untuk usaha tani agroforestri di lingkungan TNGC Kabupaten Kuningan dan Majalengka dalam kategori sempit dan sangat sempit. Luas lahan petani untuk usaha agroforestri berkisar antara 0,01–2,00 hektare. Luas lahan akan sangat menentukan jumlah volume pohon yang akan dihasilkan dalam usaha agroforestri. Agroforestri adalah sistem usaha yang memaksimalkan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, bagi petani agroforestri penguasaan lahan yang meliputi luas dan kepemilikan menjadi hal yang sangat penting. Luas lahan yang dimiliki oleh petani akan memengaruhi pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam. Semakin luas lahan yang dimiliki petani, maka tanaman yang dipilih cenderung monokultur, sedangkan petani yang lahan sempit

lebih memilih menanam berbagai jenis tanaman (tumpang sari) agar dapat memenuhi kebutuhan subsistennya dan sekaligus mempunyai tabungan. Luas lahan garapan petani dapat berasal dari lahan milik sendiri, sewa, atau menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Ketiga sistem kepemilikan lahan ini akan memiliki pengaruh terhadap pengelolaannya, khususnya lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman tahunan atau tanaman jangka panjang. Selaras dengan penguasaan lahan, Salampessy et al. (2012) dan Hudiyani (2013) menjelaskan bahwa luas lahan yang dikuasai petani untuk usaha mempunyai hubungan yang nyata terhadap partisipasi petani.

Pengalaman usaha tani agroforestri bagi petani agroforestri di lingkungan TNGC Kabupaten Kuningan dan Majalengka tergolong rendah (82,58%). Petani agroforestri tersebut pada umumnya penduduk asli di desanya sehingga berusaha tani sudah dilakukan secara turun temurun. Pengalaman dalam usaha tani agroforestri ini dapat menunjang proses peningkatan kapasitas petani. Menurut Padmowiharjo (1994), pengalaman seseorang merupakan suatu pengetahuan yang dialami orang tersebut dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Pengaturan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sebagai hasil belajar selama hidupnya dapat digambarkan dalam otak manusia. Seseorang akan berusaha menghubungkan hal yang dipelajari dengan pengalaman yang dimiliki dalam proses belajar. Pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan akan berdampak pada hal positif bagi perilaku yang sama dan akan diterapkan pada situasi berikutnya.

Tingkat kosmopolitan petani agroforestri di lingkungan TNGC Kabupaten Kuningan dan Majalengka tergolong rendah (74,19%). Kondisi ini menunjukkan bahwa petani agroforestri di lingkungan TNGC kurang terbuka dengan informasi dari luar. Mereka memandang bahwa informasi dari luar tidak dapat meningkatkan kapasitas mereka. Suprayitno et al. (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tingkat kosmopolitan petani yang direfleksikan oleh aksesibilitas petani terhadap informasi pengelolaan hutan kemiri merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemampuan petani sekitar hutan dalam pengelolaan hutan kemiri. Semakin luas akses petani terhadap berbagai informasi pengelolaan hutan kemiri, maka akan semakin meningkat kemampuannya dalam mengelola hutan kemiri. Petani yang memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi akan memiliki informasi yang lebih banyak dengan implikasi pengetahuan dan wawasan mereka lebih luas, sikap mereka akan lebih baik,

dan keterampilan mereka akan bertambah baik. Demikian juga dengan Herman et al. (2008) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tingkat kosmopolitan berpengaruh nyata terhadap kapasitas petani sayuran baik di Kabupaten Pasuruan maupun di Kabupaten Malang. Hal ini bermakna bahwa peningkatan kekosmopolitan petani dapat berdampak pula pada peningkatan kapasitas petani.

Dukungan Penyuluhan Kehutanan terhadap Pendapatan Petani Agroforestri

Penyuluhan kehutanan di lingkungan Taman Nasional diindikasikan dengan kegiatan penyuluhan kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan, metode penyuluhan kehutanan, materi penyuluhan kehutanan, dan intensitas penyuluhan kehutanan. Manfaat kegiatan penyuluhan kehutanan bagi petani agroforestri tergolong rendah dan sangat rendah (73,9%). Kegiatan penyuluhan kehutanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada umumnya masih bersifat keproyekan dan sekedar mengejar target program pemerintah. Kegiatan penyuluhan kehutanan yang diselenggarakan belum sesuai dengan kebutuhan petani dalam pengembangan usaha tani agroforestri. Pada prinsipnya kegiatan tersebut diterima dan direspons dengan baik oleh petani agroforestri di lingkungan Taman Nasional di wilayah Kabupaten Kuningan dan Majalengka, namun petani agroforestri belum dapat merasakan manfaat dari kegiatan penyuluhan yang pernah diikuti yaitu pertemuan kelompok tani hutan, pelatihan keterampilan, menonton film penyuluhan, atau studi banding. Kegiatan-kegiatan tersebut cenderung jarang dilakukan.

Kompetensi penyuluh kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsi penyuluhan di lingkungan Taman Nasional tergolong rendah dan sangat rendah (58,4%). Kompetensi penyuluh kehutanan ini dibuktikan dengan kemampuan penyuluh kehutanan dalam menggali informasi atau permasalahan yang dihadapi petani. Kompetensi tersebut juga dibuktikan melalui kemampuannya dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan petani, kemampuan memecahkan masalah petani, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi petani.

Ketepatan metode penyuluhan kehutanan yang digunakan oleh penyuluh kehutanan tergolong rendah dan sangat rendah (76,1%). Ketepatan metode penyuluhan kehutanan yang digunakan tersebut diukur dari aktivitas penyuluh kehutanan dengan ceramah, diskusi/tanya jawab, kunjungan lapangan/studi banding, sekolah lapang, pemberian buku atau majalah.

Secara umum materi penyuluhan kehutanan yang disampaikan kepada petani agroforestri di lingkungan TNGC sudah cukup sesuai dengan kebutuhan petani yaitu tergolong tinggi (52,6%). Namun demikian, materi kurang bisa diterima dengan baik karena metode yang digunakan kurang tepat.

Intensitas penyuluhan kehutanan yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan tergolong rendah dan sangat rendah (85,5%). Intensitas rendah sama artinya dengan penyuluhan kehutanan jarang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan pertemuan kelompok tani hutan, keterlibatan petani pada kegiatan penyuluhan di luar desanya, dan kehadiran penyuluh kehutanan di lokasi usaha/kebun petani.

Lembaga pengelola kawasan TNGC dalam hal ini Balai TNGC dan Pemerintah Kabupaten setempat mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kehutanan. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh penjelasan bahwa intensitas penyuluhan kehutanan ini rendah karena belum terjalin koordinasi dan kerja sama yang optimal antara lembaga Balai TNGC dengan lembaga penyuluhan pemerintah daerah setempat. Penyuluh kehutanan pada pemerintah daerah setempat memandang bahwa penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di wilayah desa penyangga kawasan Taman Nasional menjadi tanggung jawab lembaga pengelola Kawasan Taman Nasional. Padahal, jumlah tenaga penyuluh kehutanan pada Balai Taman Nasional relatif sangat sedikit yaitu hanya terdapat tiga orang penyuluh PNS untuk wilayah kerja Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Cirebon.

Van den Ban dan Hawkins (1999) menjelaskan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan yang bersifat nonformal di luar sistem sekolah yang biasa (Setiana 2012). Menurut Sumardjo (1999), filosofi dan prinsip-prinsip penyuluhan dalam arti yang sebenarnya adalah partisipatif, dialogis, konvergen, dan demokratis, sehingga memberdayakan dan bukannya praktik-praktik penyuluhan yang bersifat *top down*, linier, dan bertentangan dengan filosofi pembangunan manusia. Penyuluhan harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berfikir kreatif dan dinamis, mengacu kepada kenyataan

yang ditemukan di lapangan atau harus selalu disesuaikan dengan keadaan di lapangan.

Kegiatan penyuluhan adalah kegiatan mendidik (Asngari 2001), maka penyuluh harus mampu berperan sebagai pendidik untuk mengubah perilaku masyarakat sasaran. Terdapat tiga peran utama penyuluh dalam pengelolaan usaha tani, yaitu pendidik/edukator, fasilitator, dan mediator. Peran penyuluh sebagai pendidik ditekankan kepada peran penyuluh dalam meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan usaha tani, baik kapasitas manajerial, sosial maupun teknis melalui proses pembelajaran. Penyuluh sebagai fasilitator berperan untuk mendorong dan membantu petani dalam pengambilan keputusan usaha tani yang efektif dan efisien. Peran penyuluh sebagai mediator di-maksudkan sebagai aktivitas penyuluh untuk menjembatani para pihak dalam pengelolaan usaha tani dengan cara memberi saran, pertimbangan, dan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi (Suprayitno et al. 2012).

Dukungan Lingkungan terhadap Pendapatan Petani Agroforestri

Dukungan lingkungan dalam penelitian ini diindikasikan dengan aksesibilitas ekonomi, kondisi ekologis, dan peran KTH. Aksesibilitas ekonomi dan peran KTH bagi petani agroforestri di lingkungan Taman Nasional tergolong rendah, sedangkan kondisi ekologisnya tergolong tinggi.

Aksesibilitas ekonomi di lingkungan Taman Nasional Kabupaten Kuningan dan Majalengka dalam kategori rendah dan sangat rendah (85,16%). Kondisi ini membuktikan bahwa petani agroforestri dalam mengembangkan usahanya masih tergantung pada kekuatan modal pribadi atau keluarga. Mereka masih belum bergantung pada dukungan modal dari lembaga keuangan pemerintah, swasta, dan atau koperasi. Hasil dari wawancara mendalam, ditegaskan bahwa mereka tidak tertarik dengan lembaga keuangan (bank) yang menawarkan pinjaman modal usaha tani. Ketidaktertarikan tersebut karena faktor bunga bank. Usaha tani agroforestri mereka ibaratkan seperti mengadu nasib atau judi. Jika nasib baik akan dapat untung besar dan jika nasib tidak baik akan menderita kerugian. Hal ini disebabkan oleh faktor harga produk yang tidak jelas.

Ruhimat (2015a) menjelaskan bahwa terdapat tujuh atribut pada dimensi ekonomi yang berpotensi memengaruhi tingkat keberlanjutan usaha tani agroforestri yaitu tingkat efektivitas ekonomi, kestabilan harga jual hasil panen, sumber modal usaha tani, tempat penjualan hasil, diversifikasi sumber pendapatan, sistem

penjualan hasil panen dan kontribusi agroforestri terhadap pendapatan total petani. Keberlanjutan untuk dimensi ekonomi berada pada status kurang berkelanjutan. Faktor pengungkit pada dimensi ekonomi yang memengaruhi tingkat keberlanjutan terdiri dari kontribusi agroforestri terhadap pendapatan total petani dan sistem penjualan hasil panen. Kepastian pasar untuk penjualan produk hasil usaha agroforestri menjadi penting bagi petani dalam rangka kelangsungan usaha agroforestri. Hal ini selaras dengan Suherdi et al. (2014) yang menjelaskan bahwa kemudahan pemasaran memiliki hubungan positif sangat nyata dengan motivasi usaha hutan rakyat.

Kepastian pasar merupakan aspek berikutnya yang memengaruhi tingkat motivasi petani sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan kemiri. Tujuan akhir dari suatu usaha tani adalah, selain untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, hasilnya dapat dijual atau memberikan keuntungan finansial. Pemasaran buah kemiri oleh petani sekitar hutan kemiri Kabupaten Maros, pada umumnya, tidak menemui banyak hambatan karena telah ada pihak yang siap menampung atau membeli produksi kapan saja petani menjualnya. Hal ini memberikan jaminan atas keberlangsungan finansial rumah tangga petani (Suprayitno et al. 2011).

Kondisi ekologis pada lahan usaha tani agroforestri di lingkungan TNGC tergolong baik (80%). Topografi lahan di lingkungan TNGC pada umumnya berbukit, tetapi akses jalan relatif bagus sehingga mudah dijangkau dengan alat transportasi sampai dengan kendaraan roda empat. Kondisi ini mempermudah petani untuk melakukan aktivitas usaha taninya, misalnya pengangkutan bibit, pupuk, dan hasil taninya. Agroforestri merupakan salah satu bentuk pemanfaatan lahan yang mengombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian dan atau ternak pada lahan yang sama dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Lahan petani sangat didukung oleh akses wilayah. Tingkat kesulitan jangkauan wilayah usaha dapat memengaruhi motivasi petani dalam usaha agroforestri termasuk dalam pemilihan komoditas usahanya. Kondisi topografi wilayah usaha agroforestri juga sangat menentukan dalam pemilihan komoditas usaha. Selain itu, akses wilayah usaha agroforestri terhadap pasar juga menjadi pertimbangan petani. Akses terhadap pasar dapat memengaruhi kepastian harga dan hal ini tentunya akan berdampak pula pada tingkat keberlanjutan usaha agroforestri. Demikian halnya dengan tingkat kesuburan tanah juga akan menentukan pola usaha tani.

KTH agroforestri dalam menjalankan perannya masih kurang optimal, yaitu 65,48% dalam kategori rendah dan sangat rendah. Tujuan utama petani berkelompok dalam pengelolaan lahan dengan sistem agroforestri adalah untuk mencapai tujuan bersama-sama. Tujuan kelompok tersebut harus sejalan dengan tujuan anggota kelompok, dengan demikian kelompok akan dinamis dan saling menjaga. Selain itu, manfaat berkelompok adalah membantu dalam memudahkan transfer pengalaman dan informasi. Oleh karena itu, dengan berkelompok akan terjadi proses pembelajaran antarsesama anggota kelompok. Ruhimat (2015b) menjelaskan bahwa optimalisasi terhadap eksistensi kelompok tani dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran kelompok tani dalam usaha tani agroforestri.

Terdapat tiga peran utama kelompok tani dalam proses usaha tani agroforestri, yaitu kelompok tani sebagai kelas belajar-mengajar, unit produksi usaha tani, dan wahana kerja sama. Sebagai kelas belajar-mengajar, kelompok tani menjadi wadah belajar-mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta mengembangkan kemandirian anggota dalam usaha tani. Sebagai unit produksi, kelompok tani merupakan satu kesatuan usaha tani dalam mencapai skala ekonomis yang lebih menguntungkan, baik dilihat dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Sebagai wahana kerja sama, kelompok tani merupakan tempat memperkuat hubungan di antara anggota kelompok dan hubungan dengan para pihak di luar kelompok sehingga anggota kelompok mampu menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam berusaha tani. Lebih lanjut, Ruhimat (2015a) menegaskan bahwa eksistensi kelompok tani adalah merupakan salah satu faktor kunci penentu keberlanjutan usaha agroforestri. Faktor eksistensi kelompok tani tersebut harus dikelola dan diakomodasi dalam pengembangan kebijakan usaha tani agroforestri berkelanjutan.

Peran Kepemimpinan Tokoh Informal dalam Peningkatan Pendapatan Petani Agroforestri

Kepemimpinan tokoh informal diindikasikan dengan peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Peran interpersonal kepemimpinan informal relatif rendah dan sangat rendah (56,1%). Rendahnya peran interpersonal kepemimpinan informal di lingkungan Taman Nasional diukur melalui kehadiran tokoh pada acara masyarakat, dapat jadi panutan, dan sifat mengayomi. Selain itu, juga diukur dengan kemampuan membagi tugas, memimpin dan menggerakkan masyarakat,

hubungan baik dengan penyuluh atau pihak lain demi kepentingan masyarakat khususnya petani agroforestri.

Peran informasional kepemimpinan informal tergolong rendah dan sangat rendah (68,4%). Peran informasional ini dibuktikan dengan kemampuan tokoh informal dalam mencari informasi sesuai kebutuhan petani. Tokoh informal juga menjadi sumber informal bagi petani, tempat bertanya dan berdiskusi serta sebagai juru bicara dalam berbagai persoalan petani. Dibuktikan juga melalui kemampuannya dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan petani, kemampuan memecahkan masalah petani, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi petani.

Peran pengambilan keputusan kepemimpinan informal tergolong rendah dan sangat rendah (63,2%). Peran pengambilan keputusan tersebut diukur dari aktivitas usaha yang ditekuni oleh tokoh informal, kemampuan mengatasi perselisihan warga petani dan pemecahan persoalan yang dihadapi petani, kemampuan dalam mencari fasilitas modal usaha, aktivitas dalam pengembangan usaha tani, dan kemampuan bernegosiasi dengan pihak lain demi kepentingan petani. Tokoh informal berperan dalam memfasilitasi antara keinginan masyarakat setempat dengan pihak pemerintah atau swasta. Tokoh informal menjadi pendorong bagi masyarakatnya dalam mengelola hutan agar tidak merusak dan mendorong pemerintah agar memperhatikan kemauan dan kepentingan petani. Tokoh informal juga berperan menjadi juru bicara atau wakil masyarakat dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah, demikian juga sebaliknya. Hal ini selaras dengan Suprayitno et al. (2011) yang menyatakan bahwa tokoh masyarakat sekitar hutan kemiri dapat memainkan peranan penting dalam memotivasi masyarakat atau petani sekitar hutan untuk melestarikan hutan.

Suhendi (2013) menjelaskan bahwa seorang yang ditokohkan biasanya memiliki sifat keteladanan. Artinya, dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya. Oleh karena itu, dalam ajaran kepemimpinan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin yang baik harus memiliki tiga sifat utama, yaitu *ing ngarsa sung tuladha*, *ing madya mangun karsa*, dan *tut wuri handayani*. Hal yang demikian tentunya harus dimiliki pula pada mereka yang ditokohkan oleh masyarakat. Banyak alasan mengapa seseorang dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat, di antaranya adalah karena pendidikan, pekerjaan, kekayaan, keahlian, keturunan, dan lain-lain. Namun, berbagai faktor yang menjadi latar belakang seseorang menjadi

tokoh tidak akan baik kalau dalam dirinya tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu, kemampuan memengaruhi orang lain merupakan perpaduan yang baik jika digabungkan dengan faktor-faktor ketokohan, yaitu pendidikan, pekerjaan, kekayaan, keahlian, atau keturunan. Semakin banyak seseorang memiliki atribut tersebut ditambah jiwa kepemimpinan dan keteladanan, maka orang tersebut akan semakin ditokohkan.

Tokoh informal di tengah-tengah komunitas masyarakat desa yang paternalistik, mempunyai potensi besar untuk dapat memainkan peran kepemimpinannya. Hal ini mengingat bahwa konsep dasar dari kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya. Seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (2013), kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dari seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk memengaruhi orang lain (yaitu orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Melalui kepemimpinan tokoh informal, potensi kemudahan untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat sekitar hutan ke arah yang lebih baik adalah lebih besar.

Kepemimpinan merupakan interaksi antara pemimpin dan pengikut yang saling memengaruhi dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi (Raharjo dan Nafisah 2006; Brahmasari dan Suprayetno 2008; Cameron 2011; Avolio et al. 2014). Kepemimpinan merupakan suatu proses hubungan memengaruhi atau mengarahkan (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan (partisipasi) para pengikut/bawahan secara sadar karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin dalam bekerja sama melalui cara pemberian visi, semangat, antusiasme, kasih, kepercayaan, kegiatan, nafsu, obsesi, konsistensi, penggunaan simbol, perhatian mencapai sebuah visi atau serangkaian tujuan yang direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi (Meitha dan Sasmito 2016). Sudaryono (2014) menjelaskan bahwa faktor-faktor dalam kepemimpinan adalah pemimpin, pengikut, situasi, dan komunikasi. Mintzberg (1973), Sillong et al. (2008), dan Sudaryono (2014) mengelompokkan sepuluh peran pemimpin ke dalam tiga kategori, yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan.

Van den Ban dan Hawkins (1999) mengemukakan bahwa tokoh masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap cara berpikir dan bertani masyarakat setempat. Pengaruh yang besar seorang tokoh masyarakat dalam masyarakatnya antara lain (a) sebagai

penerus informasi dari luar kelompok masyarakat; (b) sebagai penafsir informasi dari luar atas dasar pendapat dan pengalamannya sendiri; (c) sebagai pemberi contoh untuk ditiru bagi masyarakat sekitarnya; (d) sebagai pengukuh atau penolak suatu perubahan dari luar atau pelegitimasi suatu perubahan; dan (e) berpengaruh dalam mengubah norma kelompok masyarakat.

Sebaran petani agroforestri menurut peran kepemimpinan informal memperkuat pendapat Liow et al. (2015), yaitu pemimpin tidak resmi atau informal leader selalu saja dapat ditemui pada setiap komunitas. Meskipun tidak memiliki SK Pengangkatan sebagaimana lazimnya pemimpin formal pada lembaga swasta maupun pemerintah, namun kepemimpinan informal leader sangat efektif dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu kemampuannya untuk memengaruhi (influence) orang lain untuk bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si pemimpin itu sendiri. Kuatnya pengaruh yang dimiliki pemimpin informal berkaitan dengan proses kemunculannya yang didasarkan atas kemauan dari anggota kelompok atau orang-orang yang dipimpinnya karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dan berorientasi pada kepentingan anggota kelompok. Dengan demikian, maka wajar apabila loyalitas anggota kelompok tidak diragukan lagi. Hal itu juga selaras dengan yang dinyatakan oleh Mutmainah dan Sumardjo (2014) bahwa pemimpin kelompok memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola kelompok taninya. Peran pemimpin kelompok meliputi kemampuan pemimpin dalam memberikan arahan dan tuntunan bagi anggota kelompoknya, mampu memfasilitasi agar tercapai tujuan, mampu mendinamiskan para anggota untuk aktif, dan mampu dalam menampung aspirasi anggota kelompoknya.

Partisipasi Petani dalam KTH Agroforestri

Tingkat partisipasi petani dalam KTH agroforestri di lingkungan TNGC diindikasikan dengan partisipasi ekonomi dan partisipasi sosial. Tingkat partisipasi ekonomi petani dalam KTH agroforestri relatif masih lemah yaitu 88,06% dalam kategori rendah dan sangat rendah. Sedangkan tingkat partisipasi sosial petani dalam KTH agroforestri relatif baik, yaitu 54,19% dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Tingkat partisipasi ekonomi petani dalam KTH agroforestri diukur melalui pemilihan tanaman sesuai kesepakatan KTH, penggunaan modal yang diperoleh melalui KTH, dan jumlah kerja sama yang telah dijalin oleh petani. Sementara itu, tingkat partisipasi sosial petani dalam KTH

agroforestri diukur dengan keaktifan petani dalam kegiatan gotong royong, pengajian, hajatan, pertemuan KTH, atau membantu tetangga yang terkena musibah.

Partisipasi petani dalam KTH agroforestri adalah keterlibatan individu petani secara aktif dalam situasi kegiatan KTH agroforestri yang mendorong mereka untuk berkontribusi dalam upaya mencapai tujuan yang dikehendaki. Keterlibatan di sini dapat dilandasi karena hanya bersifat ikut-ikutan, sesuai dengan kebutuhan, atau dapat juga karena orientasi masa depan. Hal ini sejalan dengan Suprayitno et al. (2011), Salampessy et al. (2012), dan Ruhimat (2013) yang menjelaskan bahwa partisipasi petani merupakan sebuah bentuk keterlibatan aktif petani dalam suatu kegiatan usaha atau program tertentu. Inisiatif kegiatan atau program dapat berasal dari luar masyarakat atau muncul dari dalam masyarakat petani itu sendiri. Tingkat partisipasi petani agroforestri tersebut dapat dilihat dari aspek teknis, manajerial, dan sosial. Partisipasi teknis meliputi petani terlibat aktif dalam hal berbudi daya pada usaha agroforestri yang mengusahakan tanaman kehutanan dan tanaman pangan, peternakan, atau perikanan. Partisipasi manajerial yaitu merencanakan kegiatan usaha tani agroforestri, aspek melakukakan kegiatan usaha tani agroforestri, aspek menikmati dan/atau memanfaatkan hasil kegiatan usaha tani agroforestri, dan aspek mengawasi kegiatan usaha tani agroforestri. Di sisi lain, partisipasi sosial menyangkut sejauh mana petani terlibat aktif dalam usaha agroforestri yang dilandasi oleh tujuan menjaga kerusakan tanah dari bahaya longsor atau kekeringan air.

Tjitropranoto (2005) menjelaskan bahwa peningkatan partisipasi petani ke arah partisipasi interaktif dalam penyediaan teknologi dapat dilakukan dengan mengangkat petani menjadi kooperator dari suatu uji adaptasi, pelaksana gelar teknologi, dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas diri petani. Selanjutnya, partisipasi petani masih dapat ditingkatkan lagi dengan memberi kepercayaan sebagai pelaksana gelar teknologi atau plot demonstrasi, pelaksana uji adaptasi dengan bimbingan intensif dari peneliti, karena petani yang bersangkutan sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Partisipasi petani masih dapat ditingkatkan lagi sehingga mencapai tingkat partisipasi interaktif dan pengembangan diri, ialah dengan memberikan kesempatan kepada petani sebagai kooperator pada kegiatan penelitian dan atau pengkajian. Keadaan ini memberi kesempatan untuk berinteraksi secara maksimal antara petani dengan tenaga peneliti/ penyuluh. Interaksi

intensif ini merangsang petani untuk memperoleh informasi dan memahami teknologi lebih mendalam, sehingga tidak hanya dapat memanfaatkan tetapi juga mengembangkan teknologi untuk pengembangan usaha pertaniannya.

Hasil ini juga sejalan dengan Rayuddin et al. (2010) yang menjelaskan bahwa partisipasi petani dalam pembangunan perdesaan diukur melalui pendekatan model partisipasi penuh, partisipasi sedang, dan partisipasi kurang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tingkat partisipasi petani akan muncul dan dapat terwujud secara nyata apabila didukung adanya kesempatan, kemauan, dan kemampuan untuk berperan dan terlibat secara sadar. Demikian halnya dengan Suprayitno et al. (2011) yang menyebutkan bahwa peningkatan partisipasi petani dapat dilakukan dengan cara meningkatkan motivasi (motivasi untuk meningkatkan pendapatan, mendapatkan pengakuan, dan melestarikan hutan) dan kemampuan petani (kemampuan teknis, manajerial, dan sosial).

Kapasitas Petani Agroforestri dalam Peningkatan Pendapatan Petani Agroforestri

Kapasitas petani agroforestri diindikasikan dengan kompetensi agribisnis dan kemandirian petani. Kompetensi agribisnis dan kemandirian petani agroforestri di lingkungan TNGC Kabupaten Kuningan dan Majalengka tergolong rendah (53,9%). Kompetensi agribisnis diukur melalui kemampuan petani dalam menerapkan teknik usaha agroforestri, kemampuan dalam melakukan pengolahan hasil usaha agroforestri, dan kemampuan menjual hasil usaha agroforestri dengan harga yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Kemandirian petani agroforestri diukur dari tingkat daya saring, daya saing, dan daya sanding petani. Daya saring petani yaitu kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam usaha agroforestri. Daya saing petani yaitu kemampuan mengemas usaha menjadi lebih unggul dibandingkan usaha orang lain yang sejenis (usaha agroforestri lebih unggul dengan usaha orang lain). Daya sanding petani yaitu kemampuan bekerja sama dan bermitra dengan pihak lain yang saling menguntungkan (Sumardjo 1999; Sumardjo et al. 2014; Sumardjo 2016).

Kapasitas petani adalah daya-daya atau kemampuan yang dimiliki pada pribadi petani untuk dapat melakukan kegiatan pertanian, menetapkan tujuan usaha tani secara tepat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang tepat pula, mempunyai kesanggupan menjawab tantangan, serta memenuhi syarat sebagai petani unggul (Herman et al. 2008;

Anantanyu 2011). Setiap individu (orang) secara alamiah selalu memiliki kapasitas yang melekat pada dirinya. Kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi yang dimiliki merupakan suatu kapasitas petani yang tidak boleh diabaikan apabila ingin keberhasilan usaha pertanian dapat berkelanjutan (Herman et al. 2008).

Tjitropranoto (2005) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap karakteristik individu dan kapasitas diri petani akan menentukan tingkat potensi atau kesiapan petani dalam menerima teknologi yang dikenalkan kepadanya. Sebaliknya, dengan mengetahui potensi dan tingkat kesiapan petani dalam menerima teknologi pertanian, maka teknologi pertanian yang akan dikenalkan akan dapat disesuaikan dengan potensi dan kesiapan diri petani tersebut. Dengan pendekatan ini, maka petani tidak hanya akan menerapkan teknologi baru secara berkelanjutan, tetapi juga akan selalu mengembangkan usaha pertaniannya dengan menerapkan teknologi baru. Hal ini menunjukkan pula bahwa teknologi pertanian yang diperkenalkan kepada petani harus disesuaikan dengan kapasitas diri dan kapasitas sumber daya dan sarana yang dimilikinya. Penyesuaian dengan kapasitas petani, baik kapasitas diri maupun kapasitas sumber daya dan sarana, akan menjamin keberlanjutan adopsi teknologi tersebut, bahkan akan dikembangkan sendiri oleh petani yang bersangkutan.

Herman et al. (2008) lebih lanjut menjelaskan bahwa kapasitas merupakan aspek-aspek yang terinternalisasi dalam diri petani yang ditunjukkan oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menjalankan kegiatan usaha tani. Dalam kegiatan usaha tani agar petani dapat berhasil dalam melakukan usaha tani diperlukan kapasitas petani yang tinggi agar mampu dalam mengidentifikasi potensi dan memanfaatkan peluang yang dimiliki agar usaha tani yang dilakukan sesuai dengan tujuan usaha tani yang telah ditetapkan dan mencapainya tujuan tersebut secara tepat.

Mengacu pada Sumodiningrat (1999), proses menuju keberdayaan petani dilihat dari beberapa sudut pandang di antaranya (a) menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan petani berkembang; (b) meningkatkan kemampuan petani dalam membangun melalui bantuan dana, pelatihan, pembangunan sarana, prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan daerah; (c) perlindungan dengan keberpihakan pada petani yang lemah; dan (d) menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Keberdayaan petani adalah modal dasar terwujudnya kemandirian. Keberdayaan

dan kemandirian petani merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sumardjo (1999) menegaskan, bahwa individu yang mandiri sejati adalah maju (modern) dalam perilaku (kognitif, afektif, dan psikomotorik), efisien, dan berdaya saing tinggi sehingga mampu berpikir atau bertindak (mengambil keputusan) secara cepat dan tepat, serta mampu bermitra dan membangun jejaring yang saling menguatkan dan menguntungkan.

Pendapatan Petani Agroforestri di Lingkungan TNGC

Pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC tergolong rendah. Pendapatan tersebut dari hasil usaha agroforestri dan hasil usaha di luar usaha agroforestri. Pendapatan petani dilihat dari hasil usaha tani agroforestri, kemampuan petani mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dan kemampuan petani menabung. Hal ini sejalan dengan Diniyati et al. (2013) yang menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup petani dan keluarganya, pada umumnya mereka tidak hanya mengandalkan pada salah satu jenis usaha atau pekerjaan saja, melainkan juga mengerjakan usaha-usaha atau pekerjaan lain. Jika salah satu jenis usaha tersebut ada yang memberikan hasil yang lebih banyak dan bersifat kontinyu, maka usaha tersebut akan dipertahankan sebagai usaha utama dan merupakan sumber pendapatan utama. Usaha utama ini akan terus dipertahankan dan bahkan dikembangkan menjadi lebih besar.

Sekitar 78,39% petani agroforestri di lingkungan TNGC berpenghasilan rendah. Hal ini berarti bahwa usaha agroforestri yang dilakukan oleh petani di lingkungan TNGC kurang mampu memberikan hasil memadai. Pendapatan yang diperoleh kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kondisi ini juga tidak memungkinkan petani menabung untuk kebutuhan lainnya yang tidak terduga atau kebutuhan yang telah direncanakan. Pendapatan petani dari kebun hutan (agroforestri) sebagian besar merupakan hasil penjualan dari tanaman keras (kayu) jenis albasia, tisuk, gmelina, suren, aprika, jati, atau mahoni. Petani tidak melakukan penebangan secara serentak, melainkan bertahap. Rata-rata petani baru menebang pohon setelah umur lima tahun. Hal ini dilakukan karena tanaman keras (kayu) lebih berfungsi sebagai pelindung lahan dari bahaya longsor dan pengatur tata air. Selain tanaman kayu, petani juga memperoleh hasil penjualan tanaman semusim. Umumnya petani menanam bawang daun, kol, wortel, cabai, terong, tomat, ubi jalar, atau kapulaga. Penghasilan rata-rata petani dari hasil usaha tani agroforestri yang meliputi hasil

dari komoditas kehutanan (kayu-kayuan) dan komoditas pertanian (tanaman semusim) tidak lebih dari Rp725.000 per bulan.

Usaha tani agroforestri dengan kepemilikan lahan yang sempit (rata-rata 0,5 ha/petani), kurang mampu memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan petani dan keluarganya. Usaha tani agroforestri di lingkungan TNGC pada umumnya merupakan warisan dalam keluarga yang sudah turun temurun dikelola. Hal ini sejalan dengan Sumarlan et al. (2012) yang menyatakan bahwa keberlanjutan dalam penerapan sistem agroforestri di Pegunungan Kendeng dapat berjalan dengan cukup baik atau lestari. Karena kegiatan tersebut pada dasarnya telah dilakukan oleh petani secara turun temurun dengan nama "tumpang sari". Selain itu, kegiatan tersebut memiliki dampak pada ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat dirasakan secara langsung oleh petani di Pegunungan Kendeng dan juga masyarakat yang dilalui oleh DAS Juana dan hilir. Kadir dan Hayati (2011) mengungkapkan bahwa pengaturan jenis dan jumlah tanaman sela yang diusahakan oleh masyarakat di bawah tegakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Saat penelitian ini dilakukan, peningkatan pendapatan dari pengusahaan tanaman sela di TNGC belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga petani,

Penghasilan ini dapat lebih ditingkatkan lagi jika tanaman pokok (tanaman kehutanan) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengembangkan tanaman *multi-purpose tree species* (MPTS) atau dikenal dengan istilah pohon serbaguna, misalnya tanaman petai dan tanaman buah-buahan lainnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Diniyati et al. (2013) bahwa seluruh jenis tanaman penyusun hutan rakyat pola agroforestri akan memberikan kontribusi pendapatan petani. Satu jenis tanaman dikatakan telah berkontribusi terhadap pendapatan apabila hasil tanaman tersebut telah dapat dikomersialkan (dijual). Agroforestri merupakan pilihan tepat dalam pemanfaatan lahan milik masyarakat/petani karena mampu memberikan pendapatan dalam jangka pendek untuk biaya hidup harian yang diperoleh dari hasil tanaman semusim dan pendapatan jangka panjang sebagai tabungan dari hasil komoditas kehutanan (Kusumedi dan Jariyah 2010; Premono dan Lestari 2013).

Sistem agroforestri yang diterapkan oleh petani di lingkungan TNGC adalah sistem agrisilvopastur. Pada sistem ini, penggunaan lahan secara sadar dan dengan pertimbangan masak untuk memproduksi sekaligus hasil-hasil pertanian dan kehutanan. Walaupun ada juga petani memelihara ternak, namun tidak dilakukan

pada hamparan lahan yang sama di kebun, tetapi mereka membuat kandang ternak di belakang rumah masing-masing. Hal ini dengan pertimbangan keamanan dan mudah memberi makan. Ternak domba, sapi atau ayam perlu perawatan yang intensif, terutama dalam hal pakan. Jika petani membuat kandang di kebun yang jauh dengan rumah tempat tinggal, maka petani akan kesulitan dalam penjagaan siang malam dan memberi pakan atau minum. Petani merasa lebih praktis jika kandang ternaknya ada di belakang rumah mereka.

Sekitar 75,81% petani berpenghasilan rendah dari usaha di luar agroforestri. Meskipun petani mempunyai dua sumber penghasilan, namun ternyata kedua sumber penghasilan tersebut (usaha tani agroforestri dan usaha di luar agroforestri) belum mampu untuk mencukupi kebutuhan petani dan keluarganya.

Usaha lain yang dikerjakan oleh petani untuk mendapatkan penghasilan tambahan yaitu sebagai buruh tani, buruh bangunan, dagang, ternak kambing, atau ternak sapi dan ojek. Petani harus bisa membagi waktu sehingga usaha tani agroforestrinya juga tidak terbengkalai. Penghasilan rata-rata petani dari buruh, dagang, atau ternak dan ojek tersebut tidak lebih dari Rp750.000 per bulan karena buruh tani bersifat musiman. Demikian juga dengan buruh bangunan. Namun demikian, penghasilan tersebut berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga petani.

Kondisi ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Adalina et al. (2015) bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) secara sosial relatif homogen, tingkat pendidikan formal rendah, dan rata-rata tingkat pendapatan sebesar Rp1.155.000/bulan dan di bawah upah minimum regional (UMR) Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Banten. Hal ini dapat menggambarkan bahwa petani agroforestri di lingkungan TNGC masih tergolong belum sejahtera karena berpenghasilan rendah.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pendapatan Petani Agroforestri di Lingkungan TNGC

Tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC secara nyata dipengaruhi oleh faktor karakteristik individu petani, faktor dukungan penyuluhan kehutanan, faktor dukungan lingkungan dan kapasitas petani agroforestri. Aspek pada faktor karakteristik individu petani yang paling dominan berpengaruh nyata adalah aspek penguasaan lahan. Dari kelima aspek pada faktor dukungan penyuluhan

kehutanan yang paling kuat berpengaruh nyata terhadap tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan Taman Nasional adalah aspek kompetensi penyuluh kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan. Demikian pula pada faktor dukungan lingkungan, aspek yang paling kuat berpengaruh adalah aspek peran KTH, sedangkan faktor kapasitas petani agroforestri diindikasikan dengan kompetensi agribisnis dan kemandirian petani.

Untuk kasus petani agroforestri di lingkungan TNGC, ternyata kepemimpinan informal dan partisipasi petani dalam KTH tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani. Hal ini bermakna bahwa peningkatan peran kepemimpinan tokoh informal baik secara interpersonal, informasional, maupun pengambilan keputusan secara langsung tidak dapat meningkatkan pendapatan petani di lokasi penelitian. Demikian pula dengan partisipasi petani, semakin tinggi tingkat partisipasi petani tidak dapat secara langsung meningkatkan pendapatan petani agroforestri di lingkungan Taman Nasional. Persamaan regresi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani agroforestri yaitu:

$$Y = 23,928 + 0,001X_{1.3} + 0,350X_{2.2} + (-0,412X_{2.5}) + 0,210X_{3.3} + 0,263Y_3 ; R^2 = 0,318.$$

Nilai koefisien regresi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC 2017 secara rinci tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh nyata faktor karakteristik individu petani (penguasaan lahan), faktor dukungan penyuluhan kehutanan (kompetensi penyuluh kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan), faktor dukungan lingkungan (peran KTH), dan faktor kapasitas petani (kompetensi agribisnis dan kemandirian petani) secara bersamaan sebesar 31,8%. Sisanya sebesar 68,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Faktor penguasaan lahan, kompetensi penyuluh kehutanan, peran KTH, dan kapasitas petani berpengaruh positif nyata terhadap tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan Taman Nasional. Hal ini berarti bahwa semakin luas lahan yang diusahakan, semakin tinggi kompetensi penyuluh kehutanan, semakin baik peran KTH dan semakin tinggi kapasitas petani ternyata mampu meningkatkan pendapatan petani agroforestri di lingkungan taman nasional.

Tabel 2. Nilai koefisien regresi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC, 2017

Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani agroforestri	Koefisien regresi	Signifikansi
Konstanta	23,928	0,120
Umur	-0,061	0,775
Pendidikan formal	-1,079	0,102
Penguasaan lahan	0,001	0,000**
Pengalaman usaha tani agroforestri	-0,231	0,217
Tingkat kosmopolitan petani	0,048	0,727
Kegiatan penyuluhan kehutanan	-0,151	0,268
Kompetensi penyuluh kehutanan	0,350	0,015*
Metode penyuluhan kehutanan	0,112	0,530
Materi penyuluhan kehutanan	-0,185	0,110
Intensitas penyuluhan kehutanan	-0,412	0,005**
Aksesibilitas ekonomi	0,195	0,072
Kondisi ekologis	0,200	0,062
Peran KTH	0,210	0,040*
Kepemimpinan tokoh informal	0,082	0,052
Partisipasi petani dalam KTH Agroforestri	0,015	0,823
Kapasitas petani agroforestri	0,263	0,002**
Nilai R: 0,563		
Nilai R ² : 0,318		

Keterangan: *Nyata pada taraf $\alpha = 0,05$; ** Nyata pada taraf $\alpha = 0,01$

Sumber: Data primer (2017), diolah

Faktor intensitas penyuluhan kehutanan berpengaruh negatif nyata terhadap tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan taman nasional. Hal ini berarti bahwa penyuluhan kehutanan yang diikuti oleh petani agroforestri perlu mempertimbangkan waktu kerja petani. Penyuluhan kehutanan dengan pelatihan keterampilan atau studi banding di luar daerah dalam waktu yang relatif lama berdampak pada berkurangnya jam kerja petani di kebun hutan. Tanaman kurang terurus dengan baik atau perlu biaya tambahan untuk memberi upah tenaga kerja pengganti. Adanya biaya tambahan ini yang memengaruhi berkurangnya pendapatan petani.

Pertemuan dalam kegiatan penyuluhan tidak membahas sistem agribisnis secara utuh mulai dari budi daya sampai dengan pemasaran hasil. Khususnya terkait dengan pemasaran hasil pertanian, dalam pertemuan penyuluhan belum mampu menjawab persoalan petani. Penyuluhan juga masih fokus pada usaha tani agroforestri, namun kurang berhasil dalam mengembangkan alternatif usaha lain bagi petani di lingkungan TNGC ketika mereka kehilangan akses terhadap penggunaan lahan hutan pasca ditetapkannya menjadi kawasan konservasi (taman nasional). Hal ini menguatkan bahwa perlunya penyuluhan yang membahas tentang alternatif nafkah atau pendapatan bagi petani di lingkungan TNGC. Oleh karenanya, perlu kreativitas penyuluh kehutanan untuk mengembangkan alternatif sumber penghasilan selain agroforestri setelah hak atas pengolahan lahan hutan hilang. Turunnya pendapatan ini karena lemahnya akses terhadap lahan kawasan TNGC.

Lahan yang diusahakan oleh petani agroforestri di lingkungan TNGC tergolong sangat sempit, yaitu rata-rata hanya 0,5 ha (Tabel 1), padahal luas lahan sangat menentukan tingkat pendapatan petani. Sempitnya lahan yang dikelola untuk usaha tani agroforestri berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC. Nyatanya tingkat pendapatan petani Agroforestri di lingkungan TNGC juga rendah (Tabel 1). Dengan rata-rata luas lahan yang hanya 0,5 ha, petani hanya bisa menanam tanaman kayu-kayuan pada sekeliling kebun sehingga sangat sedikit jumlah tanamnya dan hanya beberapa pohon yang ditanam di bagian tengah. Tanaman kayu-kayuan yang ditanam rapat dapat mengganggu pertumbuhan tanaman semusim yang menjadi harapan petani untuk bisa panen jangka waktu pendek. Tanaman kayu-kayuan tersebut lebih bersifat sebagai tanaman pelindung.

Kompetensi penyuluh kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan merupakan aspek pada faktor dukungan penyuluhan kehutanan

yang paling kuat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC. Nyatanya kedua aspek tersebut tergolong rendah sehingga tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan Taman Nasional juga rendah (Tabel 1). Penyuluh kehutanan yang memiliki kompetensi yang mumpuni, dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Mereka lebih percaya diri, kreatif, dan mempunyai komitmen tinggi untuk menolong petani agar lebih sejahtera. Penyuluh kehutanan yang berkomitmen tinggi, lebih aktif dan sering melakukan penyuluhan. Jika kondisi seperti ini terbangun, maka petani akan lebih banyak menerima manfaat dari hasil penyuluhan kehutanan. Manfaat tersebut bisa berupa teknologi, modal usaha, atau peralatan yang secara langsung diterapkan oleh petani dalam pengembangan usaha taninya, sehingga pendapatan akan meningkat.

Peran KTH di lingkungan Taman Nasional tergolong rendah (Tabel 1). Padahal, peran KTH merupakan aspek pada faktor dukungan lingkungan yang cukup kuat berpengaruh nyata terhadap tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan Taman Nasional. KTH agroforestri yang ada kurang mampu memfasilitasi anggota dalam mencukupi kebutuhan usaha tani agroforestri, baik dalam hal modal, pupuk, bibit, atau jaminan pemasaran hasil usaha tani. Petani masih banyak yang berjuang sendiri-sendiri tanpa melalui wadah KTH dalam hal pengembangan usaha tani agroforestri. Lemahnya peran KTH ini menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan Taman Nasional.

Faktor kapasitas petani juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh sangat nyata terhadap tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan Taman Nasional. Nyatanya, kapasitas petani agroforestri di lingkungan Taman Nasional tergolong rendah (Tabel 1) sehingga tingkat pendapatan petani juga rendah. Petani dengan kapasitas yang tinggi, yaitu petani yang mempunyai kemampuan dalam berbudi daya (agribisnis) dan memiliki kemandirian dalam berusaha tani agroforestri, akan mampu menerapkan teknologi yang tepat dalam berusaha tani, memenuhi kebutuhan modal, dan menjalin mitra pasar sehingga hal ini secara langsung mampu meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Herman et al. (2008) dan Anantanyu (2011) yang menjelaskan bahwa kapasitas petani adalah daya-daya atau kemampuan yang dimiliki pada pribadi petani untuk dapat melakukan kegiatan pertanian, menetapkan tujuan usaha tani secara tepat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan

dengan cara yang tepat pula, mempunyai kesanggupan menjawab tantangan, serta memenuhi syarat sebagai petani unggul. Setiap individu (orang) secara alamiah selalu memiliki kapasitas yang melekat pada dirinya. Kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi yang dimiliki merupakan suatu kapasitas petani yang tidak boleh diabaikan apabila ingin mendapatkan keberhasilan usaha pertanian yang berkelanjutan (Herman et al. 2008).

Penelitian ini selaras dengan Diniyati et al. (2013) yang menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup petani dan keluarganya, pada umumnya mereka tidak hanya mengandalkan pada salah satu jenis usaha atau pekerjaan saja, melainkan juga mengerjakan usaha-usaha atau pekerjaan lain. Jika salah satu jenis usaha tersebut ada yang memberikan hasil yang lebih banyak dan bersifat kontinyu, maka usaha tersebut akan dipertahankan sebagai usaha utama dan merupakan sumber pendapatan utama. Usaha utama ini akan terus dipertahankan dan bahkan dikembangkan menjadi lebih besar. Lebih lanjut dijelaskan oleh Diniyati et al. (2013) bahwa seluruh jenis tanaman penyusun hutan rakyat pola agroforestri akan memberikan kontribusi pendapatan petani. Satu jenis tanaman dikatakan telah berkontribusi terhadap pendapatan apabila tanaman tersebut hasilnya telah dapat dikomersialkan (dijual). Hal itu juga sejalan juga dengan hasil penelitian Kadir dan Hayati (2011) yang menunjukkan bahwa pengaturan jenis dan jumlah tanaman sela yang diusahakan oleh masyarakat di bawah tegakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Penghasilan ini dapat lebih ditingkatkan lagi jika tanaman pokok (tanaman kehutanan) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengembangkan tanaman MPTS atau dikenal dengan istilah pohon serba guna, misalnya tanaman petai dan tanaman buah-buahan lainnya. Agroforestri merupakan pilihan tepat dalam pemanfaatan lahan milik masyarakat/petani karena mampu memberikan pendapatan dalam jangka pendek untuk biaya hidup harian yang diperoleh dari hasil komoditas pertanian dan pendapatan jangka panjang sebagai tabungan dari hasil komoditas kehutanan (Kusumedi dan Jariyah 2010; Premono dan Lestari 2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC masih rendah. Penghasilan petani dari hasil usaha tani agroforestri dan dari

usaha lainnya kurang memadai sehingga kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari petani beserta keluarganya. Penghasilan rata-rata petani dari hasil usaha tani agroforestri tidak lebih dari Rp725.000 per bulan. Penghasilan rata-rata petani dari buruh, dagang, atau ternak dan ojek tidak lebih dari Rp750.000 per bulan.

Rendahnya tingkat pendapatan petani agroforestri di lingkungan TNGC dipengaruhi oleh faktor sempitnya lahan yang dikelola petani untuk usaha tani agroforestri. Faktor berikutnya adalah rendahnya kompetensi penyuluh kehutanan, lemahnya intensitas penyuluhan kehutanan, lemahnya peran KTH, dan rendahnya kapasitas petani agroforestri di lingkungan TNGC.

Saran

Kapasitas petani agroforestri perlu ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan tentang budi daya, pengolahan hasil, dan pemasaran. Kapasitas tokoh informal perlu ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan dan karakter, studi banding, sekolah lapang, atau workshop, mengingat bahwa tokoh informal berpotensi menjadi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat sehingga mereka lebih mampu menjadi teladan, informatif, dan memiliki jiwa wirausaha. Tokoh informal agar dilibatkan pada penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dalam rangka peningkatan kapasitas petani. Perlu ditingkatkan dukungan penyuluhan kehutanan terutama pada dimensi kompetensi penyuluh dan intensitas penyuluhan mengingat kedua dimensi ini sangat menentukan pendapatan petani. Perlu juga dilakukan pembinaan KTH agar lebih mampu berperan dalam upaya peningkatan pendapatan petani.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, Kepala Balai TNGC, dan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V Provinsi Jawa Barat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini, khususnya kepada para anggota kelompok tani hutan agroforestri di desa-desa penyangga kawasan TNGC Kabupaten Kuningan dan Majalengka yang telah terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Indonesia 2017. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Adalina Y, Nurrochman DR, Darusman D, Sundawati L. 2015. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar taman nasional Gunung Halimun Salak. *J Penelit Hutan Konserv Alam*. 12(2):105-118.
- Anantanyu S. 2011. Kelembagaan petani: peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. *SEPA*. 7(2):102-109.
- Asngari PS. 2001. Peranan agen pembaruan/penyuluh dalam usaha memberdayakan (*empowerment*) sumberdaya manusia pengelola agribisnis. Orasi ilmiah guru besar tetap ilmu sosial ekonomi. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Avolio BJ, Sosik JJ, Kahai SS, Baker B. 2014. E-leadership: re-examining transformations in leadership source and transmission. *Leadersh Q*. 25(1):105-131. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2013.11.003>
- Brahmasari IA, Suprayetno A. 2008. Pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan serta dampaknya pada kinerja perusahaan (Studi kasus pada PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia). *J Manaj Kewirausahaan*. 10(2):124-135.
- Cameron K. 2011. Responsible leadership as virtuous leadership. *J Bus Eth*. 98(Supplement 1):25-35.
- Diniyati D, Achmad B, Santoso BH. 2013. Analisis finansial agroforestri sengon di Kabupaten Ciamis (Studi kasus di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu). *J Penelit Agrofor*. 1(1):13-30.
- Handoko C. 2014. Some problems in maintaining sustainability of Indonesia's forests: descriptive study. *Indones J For Res*. 1(1):33-46.
- Herman, Sumardjo, Asngari PS, Tjitropranoto P, Susanto D. 2008. Kapasitas petani dalam mewujudkan keberhasilan usaha pertanian: Kasus petani sayuran di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. *J Penyul*. 4(1):11-20.
- Hidayat H. 2015. Pengelolaan hutan lestari partisipasi, kolaborasi, dan konflik. Ed ke-1. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hudiyani I. 2013. Partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Benteng Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *J Penyul*. 9(2):132-145.
- Kadir WA, Hayati N. 2011. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui agroforestri pada kawasan hutan dengan tujuan khusus borisallo. *J Penel Sos Ekon Kehut*. 8(3):231-249.
- Kusumedi P, Jariyah NA. 2010. Analisis finansial pengelolaan agroforestri dengan pola sengon kapulaga di Desa Tirip, Kecamatan Wadasliantang, Kabupaten Wonosobo. *J Penelit Sos Ekon Kehut*. 7(2):93-100.
- Langat DK, Maranga EK, Aboud AA, Cheboiwo JK. 2016. Role of forest resources to local livelihoods: the case of east mau forest ecosystem, Kenya. *Int J For Res*. 1-10. <http://dx.doi.org/10.1155/2016/4537354>
- Liow MR, Laloma A, Pesoth W. 2015. Peranan Pemimpin Informal dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Malola. *JAP*. 3(31):1-9.
- Meitha A, Sasmito C. 2016. Pengaruh kepemimpinan, kedisiplinan dan komunikasi terhadap pelayanan publik di puskesmas Kabupaten Sambas. *J Ilm Sos Ilm Pol*. 5(3):109-114.
- Mintzberg H. 1973. *The nature of managerial work*. New York (US): Harper and Row.
- Mutmainah R, Sumardjo. 2014. Peran kepemimpinan kelompok tani dan efektivitas pemberdayaan petani. *J Sosiol Ped*. 2(3):182-99.
- Padmowiharjo S. 1994. *Psikologi belajar mengajar*. Jakarta (ID): Universitas Terbuka.
- Premono BT, Lestari S. 2013. Analisis finansial agroforestri kayu bawang (*Dysoxylum mollissium* Blume) dan kebutuhan lahan minimum di Provinsi Bengkulu. *J Penelit Sos Ekon Kehut*. 10(4):211-223.
- Puspitojati T, Darusman D, Tarumingkeng RC, Purnama B. (2012). Pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi: studi kasus di kesatuan pemangku hutan Bogor. *J Anal Kebijakan Kehut*. 9(3):190-204.
- Raharjo ST, Nafisah D. 2006. Analisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja karyawan (Studi empiris pada Departemen Agama Kabupaten Kendal dan Departemen Agama Kota Semarang). *J Studi Manaj Org*. 3(2):69-81.
- Rayuddin, Zau T, Ramli. (2010). Partisipasi petani dalam pembangunan pedesaan di Kabupaten Konawe. *J Penyul*. 6(1):84-94.
- Ruhimat IS. 2013. Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan: studi kasus di KPH model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. *J Anal Kebijakan Kehut*. 10(3):255-267.
- Ruhimat IS. 2015a. Status keberlanjutan usahatani agroforestry pada lahan masyarakat: studi kasus di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat. *J Penelit Sos Ekon Kehut*. 12(2):99-110.
- Ruhimat IS. 2015b. Model peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan hutan rakyat: studi di Desa Ranggung, Kalimantan Selatan. *J Penelit Kehut Wallacea*. 4(1):11-21.
- Salampessy ML, Bramasto N, Purnomo H. 2012. Hubungan karakteristik responden dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan lindung Gunung Nona di Kota Ambon Propinsi Maluku. *J Penelit Sos Ekon Kehut*.

- 9(3):149-159.
- Setiana L. 2012. Teknik penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
- Sillong AD, Mohamad DM, Hassan Z, Ariff I. 2008. Changing roles and competencies of effective public sector leadership. *J Pengur Awam*. 1:27-46.
- Soekanto S. 2013. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta (ID): Rajawali Pers.
- Sudaryono. 2014. Leaderships teori dan praktek kepemimpinan. Jakarta (ID): Lentera Ilmu Cendekia.
- Suhendi A. 2013. Peranan tokoh masyarakat lokal dalam pembangunan kesejahteraan sosial. *Informasi*. 18(2):105-116.
- Suherdi, Amanah S, Muljono P. 2014. Motivasi petani dalam pengelolaan usaha hutan rakyat Desa Cingambul, Kecamatan Cingambul, Majalengka. *J Penyul*. 10(1):85-93.
- Sumardjo. 1999. Transformasi model penyuluhan pertanian menuju pengembangan kemandirian petani: kasus di Propinsi Jawa Barat [Disertasi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Sumardjo. 2016. Sistem diseminasi inovasi pertanian untuk meningkatkan keberdayaan petani sayuran dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian Unggulan IPB dalam Pengarasutamaan Pertanian Indonesia 2016. Bogor (ID): LPPM.
- Sumardjo, Firmansyah A, Dharmawan L, Wulandari YP. 2014. Implementasi CSR melalui program pengembangan masyarakat: inovasi pemberdayaan masyarakat PT. Pertamina EP. Asset 3 Subang Field. Bogor (ID): CARE IPB.
- Sumarlan, Sumardjo, Tjitropranoto P, Gani DS. 2012. Peningkatan kinerja petani sekitar hutan dalam penerapan sistem agroforestri di Pegunungan Kendeng Pati. *J Agro Ekon*. 30(1):25-39.
- Sumodiningrat G. 1999. Pemberdayaan masyarakat dan JPS. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka Utama.
- Suprayitno AR, Gani DS, Sugihen BG. 2011. Model peningkatan partisipasi petani sekitar hutan dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat. *J Penelit Sos Ekon Kehut*. 8(3):176-195.
- Suprayitno AR, Gani DS, Sugihen BG. 2012. Motivasi dan partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. *J Penyul*. 9(2):182-196.
- Tjitropranoto P. 2005. Pemahaman diri, potensi/kesiapan diri, dan pengenalan inovasi. *J Penyul*. 1(1): 62-67.
- Van den Ban AW, Hawkins HS. (1999). Penyuluhan pertanian. Yogyakarta (ID): Kanisius.
- Winata, Yuliana. 2012. Tingkat partisipasi petani hutan dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) Perhutani. *Mimbar*. 28(1):65-76.